



**LAPORAN KINERJA CAMAT
TRIWULAN II
Tahun 2025**

Pemerintah Kabupaten Lumajang
Kecamatan Klakah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 2025 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang periode Triwulan II Tahun 2025.

Dokumen ini menyajikan hasil Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Triwulan II Tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Klakah dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Klakah.

Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini. Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lumajang, 3 Juli 2025

CAMAT KLAKAH



ARIEF MASHUDI, S.Pi.M.P

NIP. 19730415 199803 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon II/Camat berkewajiban untuk membuat laporan kinerja Triwulan kepada Bupati Lumajang. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode Triwulan. Dan, Camat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon II/Camat tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja Triwulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Camat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulan II tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Klakah adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Camat Klakah dalam kurun waktu tiga bulan kepada Bupati Lumajang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Klakah adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1. Kondisi dan Potensi Wilayah serta Sumber Daya Alam dan Manusia

Kecamatan Klakah termasuk di daerah dataran rendah yang berpotensi pertanian utamanya pertanian lahan sawah dan tegal sangat dimungkinkan untuk dikembangkan yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kondisi dan potensi geografis

Wilayah Kecamatan Klakah terletak lebih kurang 17 Km ke arah Timur Kota Lumajang, terbentang pada posisi antara 112.51° – 113.22° BT dan 70.52° - 80.51° LS, terbagi dalam kondisi tanah sebagai berikut :

- Tanah Sawah : 901 Ha
- Tanah Kering : 3.944 Ha
- Lainnya : 3.522 Ha

Dan luas wilayah dirinci menurut penggunaan tanah sebagai berikut :

- Tanah Pertanian : 4.740 Ha
- Pekarangan Dan Bangunan : 1.574 Ha
- Hutan Negara : 358 Ha
- Lainnya : 1.695 Ha

Sedangkan ketinggian Kecamatan Klakah 193 M dpl permukaan air laut dengan suhu 20°-35° C. Curah hujan rata-rata 1.638/hari (hari hujan adalah 138 hari). Ada pun batas secara administratif Kecamatan Klakah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ranuyoso
- Sebelah Timur : Kecamatan Randuagung
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kedungjajang
- Sebelah Barat : Kecamatan Kedungjajang/ Gucialit

Kecamatan Klakah terdiri dari 12 desa, 52 Dusun, 91 RW, dan 305 RT. Adapun desa-desa dimaksud meliputi :

1. Desa Kebonan
2. Desa Kudus
3. Desa Duren
4. Desa Sumberwringin
5. Desa Papringan
6. Desa Ranupakis
7. Desa Tegalrandu
8. Desa Klakah
9. Desa MlawangDesa Sruni

- 10. Desa Tegalciut
- 11. Desa Sawaran Lor

2. Kondisi Demografis

Kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Klakah yang berjumlah penduduk 9.215 orang, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Desa Papringan dengan jumlah 2.762 orang, untuk jumlah penduduk se Kecamatan Klakah mencapai 61.962 orang dengan jumlah Kepala Keluarga 16.390.

3. Kelembagaan/Struktur Organisasi

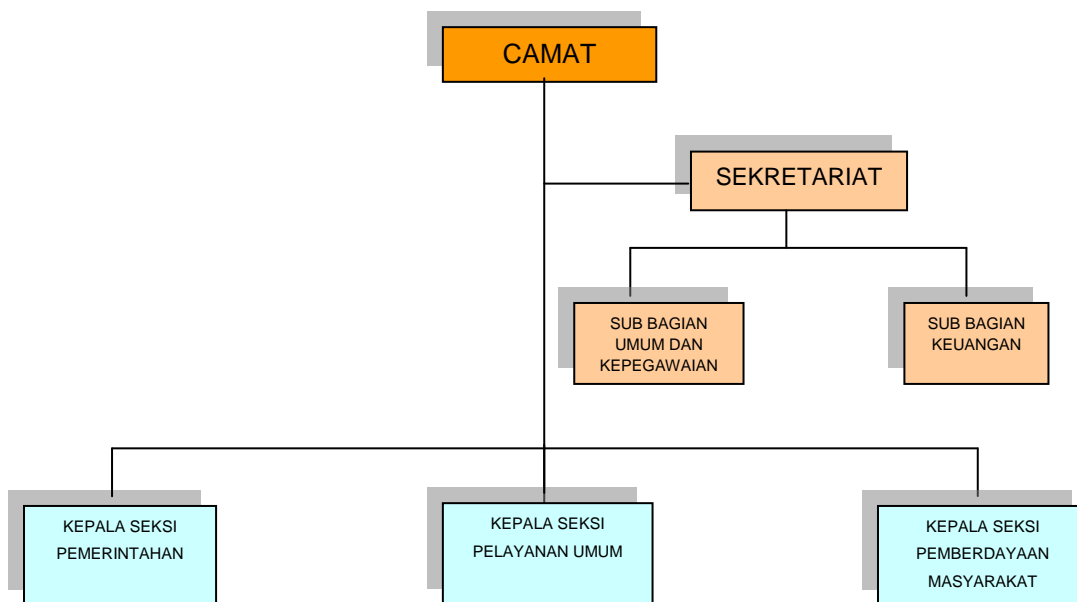
a. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan Klakah yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, mempunyai Struktur Organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

Bagan Organisasi Kecamatan Klakah

(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



b. Tugas Pokok dan Fungsi :

a. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di Wilayah Kecamatan.

b. Fungsi :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- 9) Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Personalia

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kantor Kecamatan Klakah, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Nama PNS dan Tenaga Upah Bulanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

NO	NAMA / NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	ARIEF MASHUDI, S.Pi,MP NIP. 19730415 199803 1 011	Pembina Tk.I	IV/b	Camat Klakah
2	ROMY BEGIANDY, S.Pd.S.D NIP. 19820729 201406 1 002	Penata	III/c	Kasi Yanmum
3	SUHARTO NIP. 19670403 199403 1 013	Penata Tk. I	III/d	Kasi Tata Pemerintahan

NO	NAMA / NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
				(pensiun per 1 Mei 2025)
4	NENY TRIANA, S.P NIP. 19810804 200901 2 001	Penata Muda/III.a	III/c	Kasubag Umum
5	RIOVANI ANGGARA H, A.Md NIP. 19851127 201001 1 017	Penata Muda Tk.I	III/b	Kasubag Keuangan
6	ANIK SUBIANANIK NIP. 19680702 198802 2 001	Penata Muda Tk. I	III/b	Staf
7	BHISMARIYAH G.R. NIP. 19720929 200701 2 010	Pengatur	II/c	Staf
8	NOVIE LISTIANDARI NIP. 19791120 201406 2 002	Pengatur	II/c	Staf
9	MUHAMMAD SAYYIDINA ALI NIP. 19780410 201406 1 001	Pengatur Muda	II/a	Staf
10	HERU FEBRIANTO	Staf Yanmun	S1	Staf
11	ISTIKA YUDITA A.	Staf Kasubag Keuangan	SI	Staf
12	RETNO NOVIANI	Staf Kasubag Keuangan	SI	Staf
13	DIFTA PUTRI PRICILIA	Staf Pemerintahan	SI	Staf
14	TIFANI DWI R.	Staf PMD	SI	Staf
15	DAVID KURNIAWAN	Staf Kasi Yanmum	SI	Staf
16	M. FAHRUDIN	Staf Kasubag Umum	SMA	Staf
17	ABDUL HALIM	Pengemudi	STM	Staf

1.4 ISU STRATEGIS ORGANIASI

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah

secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Klakah yaitu belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Faktor Masalah

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

b. Akar Masalah

- a) Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
- b) Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai
- c) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
- d) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah di wilayah kecamatan Klakah , sebagai berikut :

1. Masih adanya permasalahan yang memerlukan koordinasi Lintas Sektor bidang pelayanan publik

2. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, Pemberdayaan masyarakat, penerapan ketentraman dan ketertiban;
4. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di Kecamatan belum sepenuhnya representatif;
5. Masih kurangnya partisipasi aktif aparatur pemerintahan desa dalam hal pelaksanaan pemerintahan;
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki administrasi kependudukan (Admindex)

Kecamatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut menjadi alasan bagi kecamatan untuk melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama prosedur dan budaya aparatur. Jenis layanan publik yang dikembangkan mempunyai dampak langsung kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung. Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan antara lain :

- Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat
Arah Kebijakan dengan cara Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur, Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan melalui peningkatan pelayanan yang mudah, cepat dan berkualitas.
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Arah Kebijakan dengan cara Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat , Mendorong mewujudkan pembangunan Kecamatan Klakah yang terintegrasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pengembangan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif
- Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
Arah Kebijakan dengan cara Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOPIMKA
- Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Arah Kebijakan dengan cara Pembinaan dan pelatihan SDM personil LINMAS
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Arah Kebijakan Meningkatkan peran serta Aparatur Kecamatan dalam proses akuntabilitas keuangan desa , Meningkatkan kesadaran Aparatur Pemerintahan Desa dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan , Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi antaraAparatur Pemerintah Kecamatan dengan AparaturPemerintahan Desa tentang akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TARGET TUJUAN KECAMATAN KLAKAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari penjabaran Rancangan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang. Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lumajang 2025-2026, dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah di atas Kecamatan Klakah perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Klakah, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pasrujambe, sebagai berikut :

- a. Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- b. Indikator tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat
- c. Target : 83,5 Angka

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan merupakan komitmen kepala perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Namun ditengah pelaksanaan tugas terdapat perubahan perjanjian kinerja terkait dengan perubahan anggaran pada masing-masing perangkat daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggungjawab kepala perangkat daerah. Bupati selaku kepala daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala SKPD. Untuk perjanjian kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tertuang pada pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Camat tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	87

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Kinerja Kecamatan	Kecamatan	
2		Sinergisitas Kinerja Kecamatan	75

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.699.856.468,00	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	9.100.000,00	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	60.172.340,00	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	8.050.000,00	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	7.200.000,00	DAU
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		19.825.000,00	DAU
JUMLAH		Rp.	1.804.203.808,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas merupakan suatu alat pengukuran pertanggung jawaban atas suatu kewajiban, sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan suatu pengukuran pertanggungjawaban capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Akuntabilitas kinerja dibuat dan disusun dalam bentuk laporan yang disebut sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja atau biasa dikenal dengan istilah LKj.

Capaian indikator kinerja sasaran Camat Klakah Tahun 2025 secara umum dapat diuraikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran disamping berfungsi sebagai sarana pengembangan strategi organisasi di waktu yang akan datang juga secara teknis dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkan performance dari masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan Pasrujambe dalam rangka mengendalikan fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk tabel pengukuran kinerja kegiatan.

3.1.1 CAPAIAN KINERJA TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KECAMATAN KLAKAH

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sedangkan hasil pengukuran capaian kinerja merupakan hasil perbandingan antara realisasi kinerja dengan target capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja, baik Indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Pendukung dari Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Kecamatan Klakah yakni “Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi” yang dirumuskan dengan indikator tujuan yakni Indeks Pelayanan Publik sedangkan formulasi perhitungan hasil perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten dalam hal ini Bagian Organisasi Setda Kab. Lumajang melakukan perhitungan secara terpadu terkait perangkat daerah pengampu IPP. Pengukuran kinerja pada Kecamatan Klakah Triwulan II Tahun 2025 digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Tujuan Kecamatan Klakah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Capaian
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	Masih menunggu hasil dari bagian Organisasi

Pencapaian Indikator tujuan Kecamatan Klakah sampai dengan Triwulan II berdasarkan hasil perhitungan bagian organisasi.

Dalam kurun waktu Periode sampai dengan Triwulan II (Januari s.d Juni) tahun 2025, sasaran yang dicapai Kecamatan Klakah dari 2 indikator kinerja tersebut pencapaiannya dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

3.2 Lembar pencapaian sasaran Kinerja Camat sampai dengan Triwulan II 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	87	80,56 (Permenpan RB) 78,13 (Pedoman MCP KPK)	92,60 (Permenpan RB) 89,80 (Pedoman MCP KPK)	
	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	75	0	0	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Klakah tahun 2025 sebagai berikut :

❖ **Tujuan :** Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 83,5 (Angka) , terealisasi sebesar 0 (Angka) dengan capaian 0 %. Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 akan dilakukan perhitungannya dua kali yaitu pada semester 1 dan semester 2 oleh bagian organisasi Kabupaten Lumajang.

❖ **Sasaran :** Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 87 (Angka) , terealisasi Tahun 2025 sebesar 80,56% (Versi Permenpan RB) dan 78,13 (Pedoman MCP KPK) (Angka) dengan capaian 92,60 % (Versi Permenpan RB) dan 89,90 (versi Pedoman MCP KPK). Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan Kabupaten Lumajang yang mana kecamatan hanya mengirimkan data responden untuk dilakukan Survey kepuasan masyarakat secara online.
2. Sinergisitas Kinerja Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 75 (Angka) , terealisasi sebesar 0 (Angka) dengan capaian 0% atau. Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 di peroleh dari akumulatif dari penilaian dari beberapa aspek sebagai berikut :

Table . 3.3

Pencapaian Sinergisitas Kinerja Kecamatan Klakah

Tahun 2025

No.	ASPEK	BOBOT	DATA KINERJA
1	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	10	
2	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	10	
3	Pelaksanaan Tugas Delekatif	10	
4	Penyelenggaraan Tugas Atributif	30	
5	inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian	27	
6	Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan	8	
7	Pelaksanaan Tugas Lainnya	5	
Total		100	

Dalam hal ini penilaian akan dilakukan pada triwulan III tahun berkenaan sehingga realisasinya masih 0.

3.1.2 CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD

Dalam hal mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.1 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 3.2 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya sebagai berikut :

Tabel 3.3
Cost per outcome Camat Tahun 2025 - Triwulan II sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan				87	80,56% (Versi Permenpan RB) dan 78,13 (Pedoman MCP KPK)	92,60 % (Versi Permenpan RB) dan 89,90 (versi Pedoman MCP KPK)	
2		Sinergisitas Kinerja Kecamatan				75		0%	
Program									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran</i>	1.699.856.468,00	746.795.469	43,93	100%	58,06%	58,06%	14,13
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	<i>Indeks Pelayanan Publik Kecamatan</i>	9.100.000,00	2.900.000	31,87	100%	100%	100%	68,13
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	<i>Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif</i>	60.172.340,00	14.603.000	24,27	100%	52,78%	52,78%	28,51

4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	<i>Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindalkanjuti</i>	8.050.000,00	0	0	100%	0%	0%	0
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	7.200.000,00	3.600.000	50,00	100%	50%	50%	0
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	19.825.000,00	4.850.000	24,46	100%	33,33%	33,33%	8,87
Jumlah Anggaran			1.804.203.808,00	772.748.469	42.83%				
Rata – Rata Pencapaian Anggaran					42.83%				

3.1.3 PENYAJIAN DATA KINERJA

Adapun pengukuran capaian kinerja pada Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Triwulan II sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.4. Target Indikator Kinerja dalam Renstra Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5
	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87
		Sinergisitas Kinerja Kecamatan	Angka	Nilai Sinergisitas Kinerja Kecamatan	75

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta guna tercapainya target tujuan dan target sasaran strategis pada Kecamatan Klakah Tahun 2025, diperlukan program guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun program pada Kecamatan Klakah Tahun 2025 ada 6 program yakni pelaksanaan kinerja tujuan dan sasaran.

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

3.2.1 ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Untuk menunjang capaian kinerja Kecamatan Klakah, didukung oleh kinerja dari masing-masing bagian sebagai pengampu program atau kegiatan yang ada di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, antara lain :

1. Komitmen terhadap Rencana Program dan Kegiatan yang ada;
2. Bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan;
3. Melaksanakan penyelesaian SPJ dan program kegiatan sesuai rencana;
4. Disiplin kinerja Aparatur Sipil Negara;
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;
6. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;
7. Inisiatif, kreatif dan kerjasama tim;
8. Faktor kepemimpinan, aspek yang menjadi factor keberhasilan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Klakah adalah motivasi, arahan dan

bimbingan dari pemimpin serta pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin

3.2.2 ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja pada Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan Struktural dan Pelaksana di kecamatan Klakah;
4. Kurangnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
5. Masih lemahnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
6. Kurangnya Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan data kependudukan sehingga dapat menghambat pelayanan.

3.2.3 UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

1. Mengoptimalkan sarana dan prasana yang ada;
2. Mengoptimalkan SDM yang ada;
3. Mengoptimalkan personil yang ada;
4. Mengoptimalkan Publikasi SP dan SOP Prosedur Pelayanan;
5. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
6. Meningkatkan Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan data kependudukan sehingga dapat menghambat pelayanan.

3.2.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			T	R	%	P	R	%	
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87	80,56% (Versi Permenpan RB) dan 78,13 (Pedoman MCP KPK)	92,60 % (Versi Permenpan RB) dan 89,90 (versi Pedoman MCP KPK)	1.804.203.808,00	772.748.469	42.83 %	49,77 % (Versi Permenpan RB) dan 47,07 (versi Pedoman MCP KPK)

2		Sinergisitas Kinerja Kecamatan	75		%				
---	--	--------------------------------	----	--	---	--	--	--	--

Bedasarkan pada tabel diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pencapaian pada sasaran strategis 1 sampai dengan Triwulan II mencapai 92,60 % (Versi Permenpan RB) dan 89,90 (versi Pedoman MCP KPK) total anggaran yang digunakan dari pagu sebesar 42,83% efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dapat di hitung dengan rumus :

Efisiensi : %Pencapaian Kinerja - %Realiasi anggaran : $92,60\% - 42,83\% = 49,77\%$ (Versi Permenpan RB) dan %Pencapaian Kinerja - %Realiasi anggaran : $89,90\% - 42,83\% = 47,07\%$ (versi Pedoman MCP KPK), menunjukan bahwa sudah efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian sampai dengan kinerja pada Triwulan II tahun 2025.

3.2.5 ANALISIS PROGRAM YANG PENUNJANG KEBERHASILAN

Program yang dilaksanakan Kecamatan Klakah pada tahun 2025 sejumlah 6 program, analisis program yang menunjang keberhasilan dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Analisis Program Yang Penunjang Keberhasilan s/d Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Faktor pendukung keberhasilan	Faktor penghambat keberhasilan
Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota	<i>Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran</i>	1. Mengoptimalkan SDM yang ada 2. Mengoptimalkan sarana dan Prasarana yang ada	1. Masih Kurangnya SDM Kecamatan Klakah 2. Sarana dan Prasarana Kecamatan belum memadai
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	<i>Indeks Pelayanan Publik Kecamatan</i>	1. Petugas Pelayanan diharuskan mengikuti Bimtek, diklat/webinar terkait dengan pelayanan publik. 2. Perencanaan sarana prasarana sesuai kebutuhan prioritas, mengoptimalkan sarpras yang ada. 3. Mengoptimalkan penggunaan Media Sosial dalam keterbukaan Informasi terkait Pelayanan Publik pada Kecamatan. 4. Pembinaan dan evaluasi oleh Pimpinan bersama staf dalam menjalankan tupoksi masing masing. 5. Dilakukan	1. Kapasitas SDM Aparatur Pelayanan yang belum memadai. 2. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai. 3. Keterbukaan Informasi terkait Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat melalui media sosial masih kurang maksimal. 4. Masih kurangnya keselarasan pemahaman SDM di kantor Kecamatan klakah dalam penyiapan data Evaluasi kinerja.

Sasaran Perangkat	Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Sasaran	Faktor pendukung	Faktor penghambat
			peningkatan Publikasi melalui media elektronik maupun non elektronik	5. Publikasi Persyaratan pelayanan kurang maksimal
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	<i>Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif</i>	Melaksanakan Evaluasi Paska pelaksanaan kegiatan	Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	<i>Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</i>	1. Perlu dilaksanakan Diklat/Pelatihan Linmas Desa yang dilakukan secara berkala. 2. Dibutuhkan Anggaran Sarpras Linmas Desa untuk menunjang Kegiatan Linmas	1. Masih kurangnya SDM dari beberapa Satgas Linmas Desa terkait tugas pokok dan fungsi sebagai Linmas Desa.
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Peningkatan volume Patroli forkopimca serta sinergitas dengan babinsa dan babinkamtibmas	Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban umum
Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	Melakukan Pendampingan penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa dilakukan oleh Tim Binwas Kecamatan	1. Penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu namun cenderung di batas akhir pengumpulan. 2. Masih diperlukannya

Sasaran Perangkat	Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Sasaran	Faktor pendukung	Faktor penghambat
				pendampingan dalam Penyusunan Dokumen RKPDes, LPPDes dan APBDes.

3.2.1 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Kecamatan Klakah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran s/d Triwulan II Tahun 2025

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n- 1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran</i>	100 %	1.699.856.468,00	58,06 %	746.795.469
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	<i>Indeks Pelayanan Publik Kecamatan</i>	65	9.100.000,00	100 %	2.900.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	<i>Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif</i>	100 %	60.172.340,00	52,78 %	14.603.000
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	<i>Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindalkanjuti</i>	100 %	8.050.000,00	0 %	0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<i>Persentase peningkatan fasilitasi penyelenggaraa n pemerintahan umum</i>	100 %	7.200.000,00	50 %	3.600.000
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	100 %	19.825.000,00	33,33 %	4.850.000

BAB IV PENUTUP

4.1 Ringkasan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 Pertanggungjawaban yang dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2025 sesuai dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan dicapai. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja memuat target realisasi, strategi pencapaian, langkah – langkah keberhasilan serta cara mengatasi hambatan pada pencapaian kinerja. efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut : Pencapaian pada sasaran strategis 1 sampai dengan Triwulan II mencapai 92,60 % (Versi Permenpan RB) dan 89,90 (versi Pedoman MCP KPK) total anggaran yang di gunakan dari pagu sebesar 42,83% efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dapat di hitung dengan rumus :

Efisiensi : %Pencapaian Kinerja - %Realiasi anggaran : $92,60\% - 42,83\% = 49,77\%$ (Versi Permenpan RB) dan %Pencapaian Kinerja - %Realiasi anggaran : $89,90\% - 42,83\% = 47,07\%$ (versi Pedoman MCP KPK), menunjukkan bahwa sudah efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian sampai dengan kinerja pada Triwulan II tahun 2025, menunjukkan bahwa sudah efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja pada Triwulan I tahun 2025.

4.2 Langkah / strategi mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja kedepan

Langkah / strategi mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja kedepan pada teriwulan berikutnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasana yang ada;
2. Mengoptimalkan SDM yang ada;
3. Mengoptimalkan personil yang ada;
4. Mengootimalkan Publikasi SP dan SOP Prosedur Pelayanan;

5. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
6. Meningkatkan Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan data kependudukan sehingga dapat menghambat pelayanan.
7. Melakukan Agenda Kegiatan Berkelanjutan sebagai pertimbangan penilaian di tahun berikutnya.

Lumajang, 3 Juli 2025
CAMAT KLAKAH



ARIEF MASHUDI, S.Pi,MP
NIP. 19730415 199803 1 011